

# PERLINDUNGAN HUKUM TEHADAP PEMBELI DALAM WANPRESTASI PADA TRANSAKSI ELEKTRONIK

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Kota Nomor 40/2015/Pdt/PT SMG)

Hafidz Amirul Akmal, Sulastri

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

[Hafidzamirula@upnvj.ac.id](mailto:Hafidzamirula@upnvj.ac.id)

## Abstrak

Prilaku adalah aspek variable dari realitas dan kehidupan sosialpun memiliki perilakunya sendiri Di Indonesia Jual Beli atau Transaksi sudah menjadi prilaku atau kebiasaan Masyarakat dimana Ketika melakukan jual beli masing masing orang menemukan kesepakatan akan barang yang dijual tersebut maka terjadilah pembelian Berdasarkan ketentuan Pasal 1457 KUHPerduta. Seiring berjalannya waktu, usaha jual beli tersebut mulai banyak diminati dengan cara mengadakan perdagangan seluas-luasnya tanpa adanya perlindungan atau pengawasan dari pemerintah atau yang memiliki koneksi untuk mengatur kegiatan jual beli tersebut. Salah satu bukti yang dapat dilihat dan dirasakan adalah adanya transaksi online atau jual beli secara online atau yang bisa disebut juga *E commerce*, *E commerce* sendiri adalah jual – beli dan Pemasaran benda atau jasa menggunakan media elektronik. Namun dalam jual beli E Commerce muncul permasalahan permasalahan seperti Wanprestasi dalam jual beli. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Untuk memahami dan menjelaskan Wanprestasi dalam transaksi elektronik. Bahwa pengaturan hukum tentang wanprestasi dimuat dalam KUHPer 1243, Pasal 28 ayat 1 UU ITE, Pasal 45 Ayat 1 UU ITE. Terdapat Langkah atau upaya untuk menegakan hukum melalui cara represif dan preventif Adapun jalur hukum yang dapat di tempuh melalui jalur litigasi atau non litigasi.

**Kata Kunci:** Wanprestasi, Jual Beli, E Commerce

# **PERLINDUNGAN HUKUM TEHADAP PEMBELI DALAM WANPRESTASI PADA TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Kota Nomor 40/2015/Pdt/PT SMG)**

## *ABSTRACT*

Behavior is a variable aspect of reality and social life also has its own behavior In Indonesia, buying and selling or transactions have become the behavior or habits of the community where when buying and selling each person finds an agreement on the goods being sold, a purchase is made based on the provisions of Article 1457 of the Civil Code. Over time, the buying and selling business began to be in great demand by conducting the widest possible trade without any protection or supervision from the government or those who have the connection to regulate the buying and selling activities. One proof that can be seen and felt is the existence of online transactions or buying and selling online or what can also be called E commerce, E commerce itself is buying and selling and marketing objects or services using electronic media. However, in buying and selling E Commerce, problems arise such as default in buying and selling. This research uses normative juridical research. To understand and explain default in electronic transactions. That the legal arrangements regarding default are contained in KUHPer 1243, Article 28 paragraph 1 of the ITE Law, Article 45 paragraph 1 of the ITE Law. There are steps or efforts to enforce the law through repressive and preventive means as well as legal channels that can be traveled through litigation or non-litigation channels.

Keywords: Default, Sale and Purchase, E Commerce